

**KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA SUNGAI DUNGUN  
KECAMATAN KUALA BETARA KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG BARAT TERHADAP PENINGKATAN  
PRODUKTIVITAS HASIL PERTANIAN**

*Skripsi*

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjan  
Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Pemerintahan**



Oleh:

**M. AJI  
SIP.152003**

DOSEN PEMBIMBING:  
**Dr. RAHMI HIDAYATI, S.Ag., M.HI  
ALHUSNI, S.Ag, M.HI**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
2019**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : M. AJI  
NIM : SIP.152003  
Jurusan/Konsentrasi : Ilmu Pemerintahan/Manajemen Pembangunan Daerah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Mendalo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terhadap Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian** adalah hasil karya pribadi saya tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap untuk mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan di UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, 15 November 2019

Penulis,

  
M. AJI  
NIM: SIP.152003

Pembimbing I : Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI  
Pembimbing II : Alhusni, S.Ag., M.HI  
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi  
Jl.Jambi-MA. Bulian KM.16 SIMP. Sungai Duren.  
Jaluko Kab. Muaro Jambi (31346) Telp. (0741) (582021)  
Jambi, Oktober 2019

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di-

JAMBI

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi M. AJI yang berjudul "Kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terhadap Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

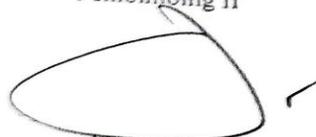
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I



Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI  
NIP.19711220 199203 2 001

Pembimbing II



Alhusni, S.Ag., M.HI  
NIP.19761225 200901 1 017

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor : B- /D.II.1/PP.009/10/2019

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : Kebijakan Pemerintahan Desa Sungai Dungun Kec.  
Kuala Betara Kab. Tanjung Jabung Barat Terhadap  
Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian.

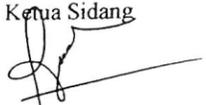
Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : M. Aji  
NIM : SIP.152003  
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 November 2019  
Nilai Munaqasyah : 77.99 ( B+ )

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

**TIM MUNAQASAH :**

Ketua Sidang

  
Dr. Bahrul Ma'ani, M.Ag  
NIP. 196302171990031004

Penguji I

  
Irsadunas Noveri, M.H  
NIP. 19711108201412 1002

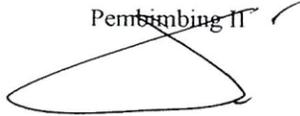
Pembimbing I

  
Dr. Rahmi Hidayati, M.HI  
NIP. 197112201992032001

Penguji II

  
Dian Mustika, S.H.,M.A  
NIP.198306222011012012

Pembimbing II

  
Al-Husni, M.HI  
NIP. 197612252009011017

Sekretaris Sidang

  
Zarkani, S.Ag  
NIP. 19760326 2002 12 1 001

Jambi, Oktober 2019

Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

DEKAN

  
Dr. A. A. Miftah, M.Ag  
NIP. 19731125 199603 1 001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## MOTTO

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ  
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ

Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> (QS. Al-Anbiyaa': 73)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

## ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian, selanjutnya untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Desa Sungai Dungun. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: *pertama* Kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian yaitu kelapa, dengan melakukan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang dilakukan dengan Mengajak Partisipasi Masyarakat, Kewenangan Pembangunan Desa (KEBIJAKAN), dengang bergotong-royong memperbaiki jalan sebagai perputaran ekonomi dan Pembinaan Masyarakat Desa, selanjutnya melakukan musyawarah dalam pengaturan produktivitas petani kelapa. *kedua* Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Desa Sungai Dungun, diantaranya; Minimnya Keterlibatan Masyarakat, di mana masih ada masyarakat yang tidak terlibat dalam pembangunan desa dan Kemampuan SDM yang Terbatas, di mana tidak semua pegawai pemerintah desa mampu mengatur dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Desa Sungai Dungun.

**Kata Kunci :** *Kebijakan Pemerintah Desa, Produktivitas Hasil Pertanian*

## ABSTRACT

*This thesis aims to find out the government policy of Sungai Dungun Village in increasing the productivity of agricultural products, then to find out the obstacles faced in increasing the productivity of agricultural products in Sungai Dungun Village. This thesis uses an empirical juridical approach with the type of qualitative research. The method of collecting data through observation, interviews, and documentation. Based on the research, the following results and conclusions are obtained: first The government policy of Sungai Dungun Village in increasing the productivity of agricultural products, namely coconut, by carrying out Village Government Implementation based on Law number 6 of 2014 conducted by Inviting Community Participation, Village Development Authority ( POLICY), by working together to improve the road as economic turnaround and Village Community Development, then conducts deliberations in managing the productivity of coconut farmers. the second obstacle faced in increasing agricultural productivity in Sungai Dungun Village, among others; The lack of Community Involvement, where there are still people who are not involved in village development and limited human resource capabilities, where not all village government employees are able to regulate in increasing agricultural productivity in Sungai Dungun Village.*

*Keywords: Village Government Policy, Agricultural Product Productivity*

## PERSEMBAHAN

### UCAPAN TERIMAKASIH KEPADA :

ALLAH SWT. Yang Selalu Melimpahkan dan memberikan kemudahan,rahmat serta

rizkinya sehingga ananda M.Aji dapat menyelesaikan skripsi ini

Buat keluarga tercinta: ayahanda **M.Ikik** dan ibunda **Kartini**, terimakasih bnyak telah mendidik dan mengasuh ananda dengan penuh kasih sayang,serta do'a dan perjuangan yang tidak pernah habis selama ini,agar ananda berguna bagi agama,nusa dan bangsa dan dapat meraih cita-cita dan tidaklupa pula adikku nur azizah dan teman teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu (program study ilmu pemerintahan angkatan 2015) serta orang yang selalu ada menjadi penyemangat.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah rabbil alamin*, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayahnya dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian shalawat dan salam semoga tetap terlimpah ke pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud Imam, Islam dan amal nyata yang *shalih likulli zaman wa makan*. Skripsi ini berjudul **“Kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terhadap Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian”** merupakan suatu kajian terhadap kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun. Dan inilah yang diketengahkan dalam skripsi ini. Berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Suaidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Bapak Dr. H. Hidayat, M. Pd selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Hj. Fadillah, M. Pd, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bapak Dr. A. A. Miftah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak H. Hermanto Harun, M. HI., Ph. D, selaku Wakil Dekan I, Bidang Akademik, Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S. Ag., M. HI, selaku Wakil Dekan II, Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Yuliatin, S. Ag., M. HI, selaku Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Ibu Mustiah RH, S. Ag., M. Sy selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
6. Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, S. IP., M. IP selaku Sekretaris jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing I dan Bapak Alhusni, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing II Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN STS Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
10. Sahabat-sahabatku jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2015.
11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini terkhusus Bapak Badaruddin selaku Kepala Desa Sungai Dungun, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi

pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita mohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, November 2019

Penulis,



M. AJI  
NIM: SIP.152003

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xI
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	17
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b>	
A. Tempat dan Waktu Penelitan .....	22
B. Pendekatan Penelitian .....	22
C. Jenis dan Sumber Data .....	22
D. Unit Analisis .....	23
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	24
F. Teknik Analisis Data.....	25
G. Sistematika Penulisan .....	27

H. Jadwal Penelitian.....	28
---------------------------	----

### **BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

A. Kondisi Umum Desa Sungai Dungun .....	39
B. Visi dan Misi Desa Sungai Dungun .....	33
C. Struktur Organisasi.....	35
D. Sarana dan Prasarana Desa Sungai Dungun.....	36

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Kebijakan Pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian.....	42
B. Kendala yang Dihadapi Dalam Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian di Desa Sungai Dungun.....	55

### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran-Saran .....	63

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

KM	: Kilometer
SNI	: Setandar Nasional Indonesia
SWT	: Subhanahu Wata'ala
SAW	: Shallallahu Alaihi Wasallam
STS	: Sulthan Thaha Saifuddin
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDA	: Sumber Daya Alam
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel. 01 Jadwal Penelitian .....	29
Tabel. 02 Jumlah Penduduk .....	32
Tabel. 03 Tingkat kesejahteraan Masyarakat.....	33
Tabel. 04 Tingkat Pendidikan .....	37
Tabel. 05 Sarana dan Prasarana .....	37
Tabel. 06 Mata Pencaharian.....	40
Tabel. 07 Pola Penggunaan Tanah.....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 01 Struktur Organisasi.....	35
-------------------------------------	----

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Wilayah perdesaan merupakan wilayah terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, peran pemerintah dilakukan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa beserta aparat desa lainnya. Peran pemerintah desa menjadi penting sebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,<sup>1</sup> kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem Pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.<sup>3</sup> Pemerintah Desa diarahkan untuk dapat menciptakan Pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan harus

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Desa Pasal 19 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>2</sup> Djuni Pristianto, *Panduan Penyusunan RPJM Desa*, (Jakarta: Yayasan Penabulu, 2015), hlm. 12

<sup>3</sup> Borni Kurniawan, *desa Mandiri, desa Membangun*, (Jakarta: Kementerian desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 27

dipandang sebagai suatu proses dalam mengejar akselerasi peningkatan ekonomi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.

Peran Pemerintah dalam analisa sosial ekonomi ialah menciptakan tingkat ekonomi masyarakat yang bebas dari tekanan persaingan ekonomi menuju kemandirian. Tujuan ekonomi tersebut yang menjadi landasan untuk bertahan dalam era desentralisasi dan salah satu tantangan adalah pemberdayaan masyarakat menuju kemantapan ekonomi dari berbagai jenjang, manakala stabilitas ekonomi menjamin sebuah kekuatan ekonomi. Untuk itu yang sangat pasti mengakses sumber ekonomi yang lebih besar. Kekuatan yang mendasar dalam menjawab hal tersebut adalah bagaimana ekonomi masyarakat bawah bisa meningkat.

Dari kondisi inilah memberdayakan masyarakat miskin adalah sebuah cara untuk memperhatikan aspek produktif, dengan tidak melalaikan spesifikasi keahlian sehingga masukan yang di distribusikan keusaha ekonomi bagi masyarakat kecil akan berhasil. Kita memahami bahwa peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam memecahkan berbagai masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dsb. Namun pemahaman yang demikian tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa adanya kritik maupun kontrol terhadap masukan karena pada prinsipnya kehadiran Pemerintah dapat diasumsikan sebagai satu-satunya cara untuk dapat memecahkan masalah dapat berbalik fakta, seperti adanya kesenjangan sosial ekonomi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan desa FPPD, 2014), hlm. 43

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan dari Pemerintahan desa dan juga harus melihat setiap kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan atau yang akan dilaksanakan, baik itu berupa peraturan perundang-undangan yang akan dikeluarkan maupun yang akan dijalankan.<sup>5</sup> Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa pemerintah Desa Sungai Dungun terkesan belum maksimal melakukan perannya dalam pemberdayaan masyarakat desa, khususnya bagi para petani. Hal ini diindikasikan dengan: masih lemahnya kapasitas pemerintah desa untuk mengatur perekonomian masyarakat desa, memberikan motivasi, pembinaan, dan penyuluhan teknis, baik yang dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan instansi terkait dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.<sup>6</sup>

Hampir 50% masyarakat Desa Sungai Dungun berada dalam garis kemiskinan dan tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah, serta banyaknya pengangguran yang ada di desa. Desa Sungai Dungun sampai saat ini masih melakukan pembangunan baik dari segi infrastruktur dan suprastruktur dan membenahi pelayanan publik yang masih tertinggal serta memberikan sumbangsih pikiran dan tenaga dalam program-program Pemerintah Desa. Syarat yang diperlukan untuk menunjukkan tingginya tingkat keberhasilan pertumbuhan

<sup>5</sup> Silahudin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, (Jakarta: Kementerian desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 62

<sup>6</sup> Observasi penulis di Desa Sungai Dungun pada 15 Januari 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ekonomi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa adalah adanya peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Tabel. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sungai Dungun.<sup>8</sup>

No	Mata Pencaharian	Jumlah %
1	Buruh Tani	60%
2	Petani	40%

Keberadaan masyarakat desa khususnya masyarakat petani kelapa berada pada posisi yang tanpa adanya pengembangan-pengembangan dalam kehidupan mereka. Padahal di Desa ini kelapa merupakan komoditi utaman petani yang layak ditingkatkan karena wilayah tofografi Desa yang sangat cocok dengan jenis tanaman kelapa. Peran Pemerintah Desa dalam pembedayaan masyarakat petani kelapa sangat perlu mendapat perhatian sebagai salah satu program agropolitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama karena belum tampak.

Pemerintah belum mengupayakan dalam menstabilkan harga yang ada pada tengkulak dan pabrik kelapa maupun mengatur pemasaran kelapa yang dapat memberdayakan petani kelapa tersebut, seringkali terjadi perbedaan harga pada setiap desa. Sehingga ini memicu kekecewaan petani kelapa dikarenakan harga yang tidak sesuai dari manfaat kelapa itu sendiri. Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Dungun, sangat penting untuk

<sup>7</sup> Observasi Penelitian, 24 Agustus 2019.

<sup>8</sup> Data dokumentasi kantor desa Sungai Dungun kec. Kuala Betara Kab. Tanjung Jabung Barat 2019

mendukung kondisi Desa ini karena sebagian besar masyarakat di Desa ini memiliki mata pencaharian sebagai petani kelapa sehingga memungkinkan dalam kegiatan pemberdayaan tanaman kelapa.

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini yaitu; Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang desa, wawancara dengan Kades desa Sungai Dungun, pegawai pemerintahan desa dan masyarakat. Ditambahkan dengan dokumentasi penelitian lapangan.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun proposal skripsi dengan judul: **“Kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terhadap Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun kecamatan Kuala Betara kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Desa Sungai Dungun kecamatan Kuala Betara kabupaten Tanjung Jabung Barat?

## **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya membahas “Kebijakan Pemerintahan Desa Sungai Dungun kecamatan Kuala Betara kabupaten Tanjung Jabung Barat Terhadap Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian Kelapa”.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun kecamatan Kuala Betara kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Desa Sungai Dungun kecamatan Kuala Betara kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penelitian mengenai kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian, ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa dan penelitian ini juga sebagai pengetahuan dan studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan



wawasan bagi penulis sendiri terhadap kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

- b. Menjadi bahan bacaan yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya.
- c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Siafuddin Jambi.
- d. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Syari'ah khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan, dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah lainnya.
- e. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

## E. Kerangka Teori

### 1. Kebijakan

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Arifin Tahir kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan dalam Tangkilisan.<sup>9</sup>

Adapun menurut Budiman Rusdi kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung

---

<sup>9</sup>Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta:Pustaka Indonesia Press, 2011), hlm. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.<sup>10</sup> Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan dengan aturan-aturan yang ada.<sup>11</sup> Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan diarahkan pada apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Menurut Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn sebagaimana yang dikutip oleh Adinda Permatasari Rahadian secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.

<sup>10</sup>Budimana Rusli, *Kebijakan Publik Membangaun Pelayanan Publik Yang Responsip*, (Jawa Barat: Hakim publishing, 2013), hlm. 5.

<sup>11</sup>Anom Surya, "Buku Teori Hukum dan Kebijakan Publik; Karya Anom Surya Putra", [https://www.Academia.Edu/7551616/Buku\\_Teori\\_Hukum\\_dan\\_Kebijakan\\_Publik\\_Karya\\_Anom\\_Surya\\_Putra](https://www.Academia.Edu/7551616/Buku_Teori_Hukum_dan_Kebijakan_Publik_Karya_Anom_Surya_Putra), diakses pada 05 April 2016.

- b. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.<sup>12</sup>
- c. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

Berdasarkan tingkat pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di atas, pada dasarnya kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. Dengan demikian dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah harus dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu bentuk dari pengalokasian nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Untuk itu penulis akan menggunakan teori kebijakan ini untuk menemukan peran pemerintah desa dalam mengatasi perekonomian petani Karet di desa Lubuk Resam.

## 2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna Litan Poltak Sinambela, yaitu :<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Adinda Permatasari Rahadian, “Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Pada Kementerian Pertanian”, Jurnal pertanian volume 3 nomor 5, 2008, hlm. 23.

<sup>13</sup> Litan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: PT Bumi Kasara, 2017), hlm. 24

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.<sup>14</sup>

### 3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-

<sup>14</sup> Ilyas, Abdurrahman, dan Sufyan, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah", Jurnal Ilmu Hukum Ilyas, Abdurrahman, Sufyan No. 65, Th. XVII April, 2015, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karenakurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

#### b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

#### c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

#### d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

#### 4. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaanyang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan(menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

- d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

## 5. Pemerintah Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.<sup>16</sup> Sedangkan desa yang dibentuk karena pemekaran ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004).<sup>17</sup> Karena Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Kepala desa bertanggung jawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. Dalam menjalankan pemerintah desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi,

<sup>15</sup> Herman, “ Kebijakan Pemerintah Kota Bitung Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara”, hlm. 4

<sup>16</sup>Heru Darmawan, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Desa*, hlm. 19.

<sup>17</sup>Silahudin, *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 36.

integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:

- a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan
- b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati tembusan Camat.<sup>18</sup>

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada didesa, sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada dibawah serta tanggung jawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

## 6. Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi ini disebabkan oleh perubahan, terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Pembangunan ekonomi adanya proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat memperbaiki menjadi lebih baik. Sukirno tahun 1996 berpendapat bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan perkapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dengan hal itu pembangunan diharapkan memiliki kenaikan pendapatan riil masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi bukan hanya merupakan gambaran ekonomi saja melainkan adanya

---

<sup>18</sup>Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 27.

pendapatan total yang dibagi jumlah penduduk. Pembangunan ekonomi bersifat multidimensional yang kebijaksanaannya komprehensif baik ekonomi maupun nonekonomi. Oleh sebab itu, menurut Eklawati sasaran pembangunan adalah :<sup>19</sup>

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.
2. Meningkatkan taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, tetapi dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.<sup>20</sup>

Dari dampak-dampak positif yang ada, terdapat juga dampak negatif dari pembangunan ekonomi, seperti halnya: Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Hilangnya habitat alam baik hayati atau hewani.

## 7. Strategi Dalam Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian

<sup>19</sup>Eklawati, "Upaya Petani Karet Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Dusun Semidang Desa Suka Maju, hlm. 5.

<sup>20</sup>Hendra Sumigar, "Kemampuan Manajerial Aparat Pemerintah Desa Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Atep Kecamatan Langowan Selatan), hlm. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial, sebelumnya perlu disusun strategi yang dapat dijabarkan sebagaimana yang dipaparkan oleh Entang Sastraadmaja sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Perencanaan

Perencanaan ini harus didasarkan atas fakta-fakta dan bukan karena didorong oleh perasaan serta keinginan-keinginan saja. Perencanaan kesejahteraan sosial meliputi pula kegiatan-kegiatan menginventarisasi sumber-sumber daya apa saja yang telah tersedia dan yang dapat disediakan. Kecuali itu mempertimbangkan bahwa wawasan perencanaan kesejahteraan sosial adalah bertitik tolak atau tertuju kepada kepentingan masyarakat.

b. Penentuan Model Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah dapat diwujudkan melalui suatu program atau kegiatan. Menurut Dolgof dan Feldstein sebagaimana yang dikutip oleh Entang Sastra ada dua macam bentuk program Pengembangan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tiga segi:<sup>22</sup>

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- 2) Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi masyarakat ini upaya yang amat

<sup>21</sup>Entang Sastraadmaja, *Pembangunan Koperasi Teori Dan Kenyataan*, hlm.33.

<sup>22</sup>Entang Sastraadmaja, *Pembangunan Koperasi Teori Dan Kenyataan*, (Bandung Penerbit Alumni, 1985), hlm. 22

pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.

- 3) Mengembangkan ekonomi masyarakat juga mengandung arti melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi masyarakat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.

Mekanisme dalam sistem ekonomi kerakyatan pada prinsipnya tetap didasarkan pada mekanisme pasar. Tetapi sejalan dengan amanat penjelasan pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dalam sistem ekonomi kerakyatan dilakukan dengan terus menerus melakukan pemetaan kelembagaan untuk mendorong perwujudan demokrasi modal atau penguasaan factor-faktor produksi. Tujuannya adalah agar perputaran roda perekonomian tidak hanya mengarah pada peningkatan kesejahteraan material dalam jangka pendek, tetapi sekaligus sebagai titik tolak untuk membangun sistem ekonomi

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dicermati bahwa terdapat beberapa cara pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi, salah satunya dengan perencanaan dan pemecahan masalah. Untuk itu penulis akan menggunakan teori ini untuk menemukan kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian kelapa.

## F. Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu;

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mikhael Wurangian Andi Reza Pahlevi Universitas Hasanuddin Makassar, ditulis pada tahun 2016, dengan judul **“Kebijakan pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Bagi Masyarakat Petani Desa Basaan I Kecamatan Ratatotok)”**,<sup>23</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayana masyarakat di desa Basaan I terutama di bagian pertanian, karena pertanian merupakan sumber mata pencaharian kebanyakan masyarakat, dengan majunya sector pertanian, maka kesejahteraan masyarakat akan bertambah juga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam rangka mendukung selesainya penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat petani yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Basaan Satu belum dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani. Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa belum dapat meningkatkan hasil/produksi pertanian para petani, para petani masih menggunakan pengetahuan konvensional dalam mengelola lahan pertanian. Kebijakan pemerintah Desa Basaan Satu dalam pemberdayaan petani dapat dilihat melalui: peningkatan mutu dan kuantitas pendidikan formal dan non formal para petani, peningkatan mutu dan frekuensi penyuluhan, kegiatan pendampingan, penyebaran informasi, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, belum sepenuhnya berhasil mengangkat para petani keluar dari ketidakberdayaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya modal usaha yang dimiliki oleh petani untuk membeli bibit, pupuk, pestisida dan keperluan produksi lainnya.

<sup>23</sup> Mikhael Wurangian, “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Bagi Masyarakat Petani Desa Basaan I Kecamatan Ratatotok”, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, hlm. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Subhan Goma Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, ditulis pada tahun 2017, dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**<sup>24</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa Bolangitang Satu dalam meningkatkan pendapatan desa, melalui pembentukan badan usaha milik desa sesuai dengan peran yaitu peran sebagai suatu kebijakan, yaitu kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa, peran sebagai strategi, yaitu strategi yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan peran sebagai alat komunikasi, yaitu digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa belum sepenuhnya berhasil, hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya kebijakan dari pemerintah desa secara konkrit yaitu peraturan desa yang memuat tentang pembentukan badan usaha milik desa serta pengelolaannya yang masih belum transparan dan akuntabel sehingga belum memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan pendapatan di desa Bolangitang Satu.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rajak Abdjul Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, ditulis pada tahun 2016, dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten**

---

<sup>24</sup> Subhan Goma , “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2017, hlm. 4

## **Bolaang Mongondow Utara Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Jagung**

<sup>25</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif, yang dikaji adalah latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dikaji maka pendekatan penelitian yang dianggap sesuai untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo belum dilaksanakan secara optimal. Terdapat beberapa peran yang telah dilaksanakan dengan baik tetapi aspek lain belum terlaksana sesuai yang diharapkan. Berdasarkan simpulan di atas maka peneliti memberikan saran kepada aparat pemerinrah desa dapat meningkatkan peran dalam pelayanan masyarakat terumana dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung yang merupakan sumber daya utama di desa. Di sarankan pula agar dapat bekerja sama dengan pihak swasta dalam hal pengadaan bibit, pupuk dan pestisida untuk masyarakat petani jagung.

Adanya persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-sama membahas kebijakan maupun upaya dari pemerintah dalam meningkatkan hasil pendapatan pertanian dan adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini

---

<sup>25</sup> Abdul Rajak Abdjul, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Jagung, 2016, hlm. 4

yaitu objek penelitian, penelitian ini berobjek kepada kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun kec. Betara kab. Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian kelapa.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tentang kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian kelapa. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pentingnya mengetahui kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian kelapa
2. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan berbagai keterangan yang diperlukan untuk menyusun proposal skripsi ini.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan epiris dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.<sup>26</sup> Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui penelitian ini tentang kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian kelapa. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>27</sup> Merriam menambahkan. kualitatif adalah suatu rencana dan cara yang akan digunakan

---

<sup>26</sup>Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 22.

<sup>27</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9.

peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)<sup>28</sup> di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer yang penulis ambil dari informasi di lapangan melalui observasi dan wawancara di lokasi penelitian, adapun data primer penulis, antara lain:
  - a. Kepala Desa Sungai Dungun
  - b. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa
  - c. Perangkat desa dan
  - d. Masyarakat.
2. Data sekunder yang penulis ambil adalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber data penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi/ peristiwa, dan dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan orang yang bisa memberikan data melalui wawancara. Sumber data yang berbentuk suasana/ peristiwa berupa suasana yang bergerak ataupun lisan, meliputi ruangan, suasana, dan proses. Sumber data tersebut merupakan objek yang akan diobservasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah peristiwa atau kejadian, di mana

---

<sup>28</sup>Sharan B. Merriam, *Rualitative Research and Case Study Applications in Education*, (New York City, 1998), hlm. 3.

dalam penelitian ini peristiwa dijadikan sumber data adalah penelitian ini tentang kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian kelapa.

#### D. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta atau sekelompok orang.<sup>29</sup> Unit analisis juga menjelaskan kapan waktu (tahun berapa, atau bulan apa) penelitian dilakukan, jika judul penelitian tidak secara jelas menggambarkan mengenai batasan waktu tersebut. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah pemerintah Desa Sungai Dungun. Penetapan unit analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen-dokumen dari informasi-informasi yang berasal dari aparat-aparatnya saja.

Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dengan pertimbangan informasi. Penentuan unit sampel dianggap telah memadai apabila telah sampai pada taraf kelebihan artinya bahwa dengan menggunakan informan selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru.<sup>30</sup> Informan adalah orang yang memberi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian (narasumber). Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti dan diperkirakan orang yang menjadi informan ini menguasai dan

<sup>29</sup>Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, (2012), hlm. 62.

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, hlm.85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memahami data, informasi, ataupun fakta dari objek penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kewenangan dan keilmuan yang terkait dengan penelitian ini, mereka diantaranya:

1. Kepala Desa Sungai Dungun satu orang.
2. Pegawai Desa Sungai Dungun tiga orang.
3. Masyarakat Desa Sungai Dungun enam orang.

### **E. Instrumen Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi

Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Martinis Yamin menyatakan bahwa “dalam observasi partisipatif peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi aktif dalam aktiivitas mereka.”<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, penulis memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan di mana penulis ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian kelapa.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi

---

<sup>31</sup>Martinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009), hlm. 79.



terstruktur (*semistructure interview*) di mana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Alat-alat yang digunakan penulis dalam wawancara adalah buku catatan, laptop, dan camera karena penulis menggunakan wawancara catatan lapangan. Hal ini bermanfaat untuk mencatat dan mendokumentasikan semua percakapan dengan sumber data, di mana kesemuanya telah digunakan setelah mendapat izin dari sumber data.

### 3. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di Desa Sungai Dungun dalam penelitian ini kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian kelapa, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.<sup>32</sup> Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti. Adapun di dalam skripsi ini penulis mengumpulkan data mengenai sejarah, visi-misi, profil, serta bukti-bukti kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian kelapa.

### F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

---

<sup>32</sup>Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 143.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui catatan lapangan dan wawancara, kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari reduksi data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Penyajian data juga dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan antara kategori dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teks yang bersifat naratif.

### 3. Kesimpulan/Verifikasi

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa, ketiga metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan lapangan, dan juga memudahkan penulis di dalam mengetahui dan menarik kesimpulan tentang kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian kelapa.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan. BAB ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulisan skripsi, baik mencakup background, pemikiran tentang tema yang dibahas. BAB I mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batsan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka.

BAB II dipaparkan, Metode Penelitian yang mencakup Pendekatan Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Unit Analsis dan Alat Analisis Data, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB III dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian. Sejarah Berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Sarana dan Prasarana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB III

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### A. Kondisi Umum Desa Sungai Dungun

##### 1. Sejarah Desa Sungai Dungun

Desa Sungai Dungun dahulunya adalah perpecahan dari dua Desa yaitu Desa Pulau Musang dan Desa Teluk Cempako yang dikepalai oleh seorang Depati yang pada Tahun 1987 berubah menjadi Desa Sungai Dungun yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Seorang Kepala Desa memimpin beberapa Dusun disekitarnya antara lain Dusun Pulau Musang dan Dusun Teluk Cempako. Nama Desa Sungai Dungun adalah gabungan dari dua Dusun yaitu Dusun Pulau Musang dan Dusun Teluk Cempako. Pada waktu penggabungan menjadi sebuah Desa disepakati secara bersama-sama menjadi nama Desa yaitu Teluk Kepayang Pulau Indah sampai sekarang. Kepala Desa Sungai Dungun yang pertama ditunjuk langsung oleh Camat dan sampai sekarang sedah berganti sebanyak:<sup>33</sup>

- a. 1972 s/d 1978 dipimpin oleh Kepala Desa M. Sarip
- b. 1978 s/d 1973 dipimpin oleh Kepala Desa Rusli
- c. 1983 s/d 1988 dipimpin oleh Kepala Desa M. Ali
- d. 1988 s/d 1993 dipimpin oleh Kepala Desa H. Darwis
- e. 1993 s/d 2009 dipimpin oleh PJS Kades Abu Bakar
- f. 2008 s/d 2014 dipimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu WINANA yang dipilih secara langsung pada tahun 2008 sampai habis mas ajabatan 2014

---

<sup>33</sup> Dokumentasi Desa Sungai Dungun, di Desa Sungai Dungun, Profil Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

g. 2014 s/d sekarang dipimpin oleh PJS Kepala Desa yaitu Sdr. Salihun sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Defenitif secara langsung dan serentak se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

## 2. Demografi

### a. Keadaan Fisik/Geografis Desa Sungai Dungun

#### 1) Batas Wilayah

Desa Sungai Dungun secara geografis memiliki dataran yang tidak terlalu bergelombang yang ketinggiannya berkisar 58 s/d 100 m DPL dengan tingkat kemiringan tanah 0 (No1) s/d > 40% dengan suhu rata-rata 28-30 derajat celcius dan curah hujan 1000 s/d 1500 mm/tahun yang terletak diantara 1.14°.368” LS (Lintang Selatan) dan 102.14°.295” BT (Bujur Timur) dan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tabun dan Cermin Alam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Produksi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tabun
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balai Rajo<sup>34</sup>

#### 2) Luas Wilayah

Luas Wilayah	: 10.175 KM <sup>3</sup>
Tanah Sawah	: 61,11 ha
Tanah Perkarangan	: 14,9 ha
Tanah Tegalan	: 79,07 ha

#### 3) Keadaan Topografi Desa

<sup>34</sup> Dokumentasi Desa Sungai Dungun, di Desa Sungai Dungun, Profil Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

Secara umum keadaan topografi Desa Sungai Dungun adalah merupakan daerah perbukitan/dataran tinggi.

#### b. Iklim

Iklim Desa Sungai Dungun sebagaimana Desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sungai Dungun .

#### Keadaan Sosial Penduduk

##### 1) Jumlah Penduduk 735 KK dengan jumlah jiwa :

Tabel. 02  
Jumlah Penduduk 735 KK dengan jumlah jiwa<sup>35</sup>

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
989	1.095	2.084

Dengan jumlah KK sebanyak 735 yang tersebar di lima Dusun dan lima belas RT dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 3-5% pertahun dengan suku yang berbeda-beda diantaranya :

- Melayu : 65%
- Jawa : 25%
- Campuran : 10% (Minang, Batak, Palembang, Lampung)

##### 2) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat: (dalam KK/Jiwa)

<sup>35</sup> Dokumentasi Desa Sungai Dungun, di Desa Sungai Dungun, Profil Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

Tabel 03  
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat<sup>36</sup>

Kaya	Sedang	Kurang Mampu
30 Jiwa	1202 Jiwa	852 Jiwa

### 3) Tingkat Pendidikan

Tabel 04  
Tingkat Pendidikan<sup>37</sup>

Tidak Tamat SD	SD	SMP	SLTA	Sarjana
200	284	84	60	30

## B. Visi dan Misi Desa Sungai Dungun

### 1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan misi di desa TKP. Indah ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sungai Dungun seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di mempunyai titik berat sektor infrastruktur. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Sungai Dungun adalah:

**“Terwujudnya Pembangunan Adil Dan Merata Serta Pembangunan Sumber Daya Manusia Dan Sarana Prasarana Guna Meningkatkan Kesejahteraan**

<sup>36</sup> Dokumentasi Desa Sungai Dungun, di Desa Sungai Dungun, Profil Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

<sup>37</sup> Dokumentasi Desa Sungai Dungun, di Desa Sungai Dungun, Profil Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

## Masyarakat, Menjadikan Desa Tkp, Indah Desa Yang Mandiri Dan Berpegang Teguh Pada Adat Istiadat”<sup>38</sup>

### 2. Misi

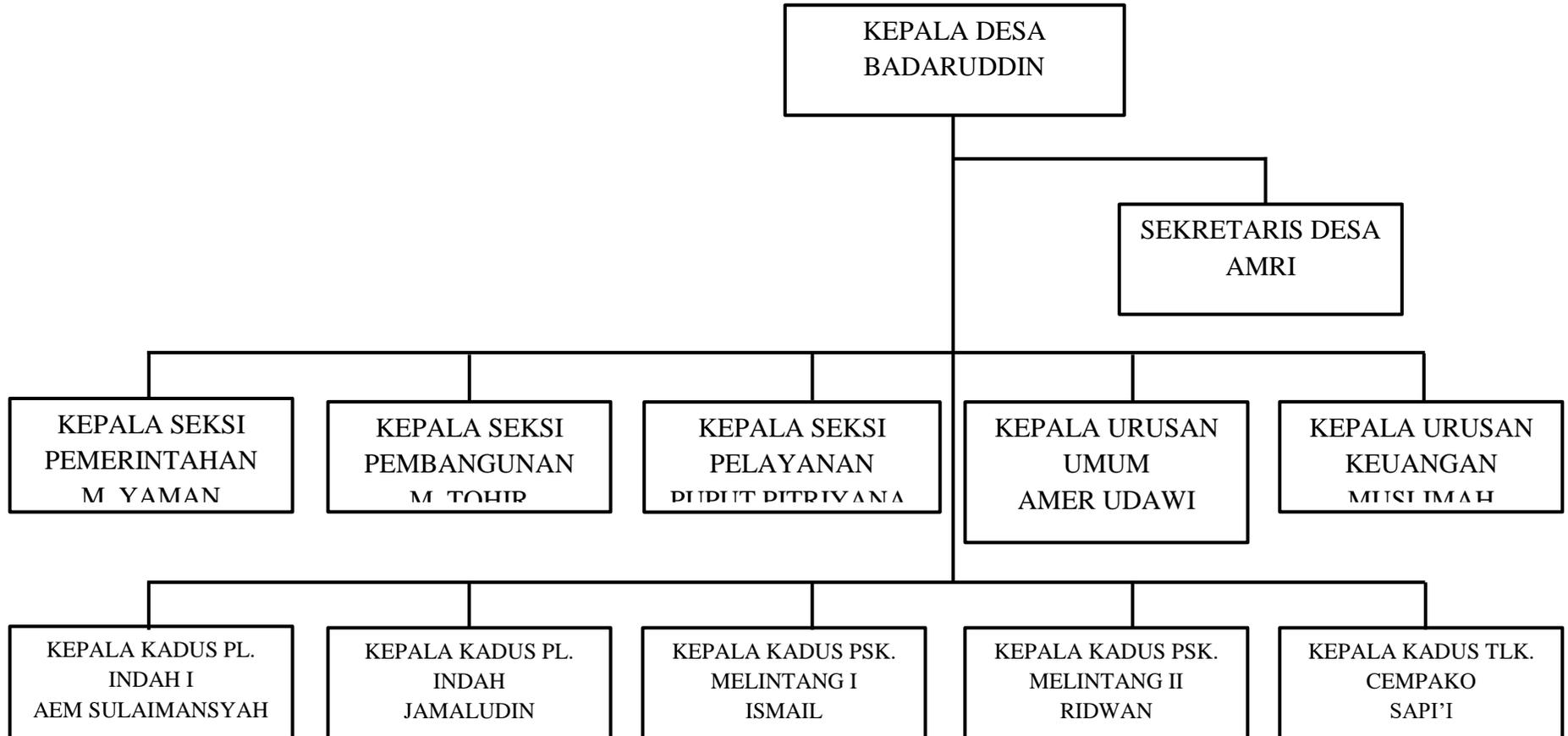
Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi. Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Sungai Dungun sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Sungai Dungun adalah:

1. Membangun Desa Sungai Dungun yang adil dan merata enam tahun ke depan minimal setara dengan Desa yang maju di Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
2. Meningkatkan Pendapatan Warga Desa Sungai Dungun Melalui Bidang Pertanian dan Perkebunan.
3. Membangun Sarana dan Prasarana Desa.
4. Mempertahankan Adat Istiadat Desa Sungai Dungun
5. Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama.

---

<sup>38</sup> Dokumentasi Desa Sungai Dungun, di Desa Sungai Dungun, Profil Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

### C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DESA SUNGAI DUNGUN.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber atau
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutba Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutba

## D. Sarana dan Prasarana Desa Sungai Dungun

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Sungai Dungun secara garis besar sebagai berikut :

### 1. Pendidikan

Di Desa Sungai Dungun terdapat beberapa gedung dan fasilitas pendidikan :

- PAUD dan TK 2 unit status swasta
- SD 2 unit status negeri (1.PL.Indah II 2 . Dusun Tl.Cempako)
- Madrasah 2 unit status swasta

### 2. Kesehatan

- Puskesmas Pembantu 1 unit
- Rumah Bidan Desa 2 unit di Pl.Indah I dan Tlk. Cempako
- Posyandu 2 unit
- 3 orang bidan.<sup>39</sup>

### 3. Olahraga

Dari hasil swadaya masyarakat Desa Sungai Dungun menambah 1 unit lapangan bola kaki yang terletak di dusun pl.indah I dengan luas 1,5 Ha dan lapangan bola kaki dusun Teluk Cempako ada 2 unit , lapangan voli 3 unit, badminton 2 unit.

<sup>39</sup> Dokumentasi Desa Sungai Dungun, di Desa Sungai Dungun, Profil Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

#### 4. Agama

Penduduk Desa Sungai Dungun terdiri dari mayoritas Islam. Bagi yang Islam terdapat tiga masjid, dan 8 unit musholla tempat beribadah. Dan memiliki 2 tempat pengajian madrasah sore terletak di dusun Pulau Indah I dan dusun Teluk Cempako.

#### 5. Ekonomi

Karena Desa Sungai Dungun merupakan Desa Pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Usia produktif 1975 jiwa usia non produktif 110 jiwa.<sup>40</sup>

#### 6. Sarana Prasarana Agama.

Tabel.05 Sarana Prasarana Desa Sungai Dungun kec. Batara kab. Tanjung Jabung Barat

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	5
2	Musholla	6
Jumlah Total		11

<sup>40</sup> Dokumentasi Desa Sungai Dungun, di Desa Sungai Dungun, Profil Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

## 7. Kemajuan Pembangunan

Pada tahun 2012 Desa Sungai Dungun membangun berbagai macam pembangunan antara lain:

- a. Pembukaan Jalan Baru sepanjang 2 km yang didanai oleh PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2010.
- b. Pembukaan Jalan Baru sepanjang 2,5 km yang didanai oleh PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2012.
- c. Pembuatan Gedung PAUD yang didanai oleh PNPM Mandiri Tahun 2013.
- d. Pengerasan Jalan Ekonomi yang didanai oleh APBD Daerah.

Pada tahun 2015 Desa Sungai Dungun membangun berbagai macam pembangunan antara lain:

- 1) Pembangunan Drainase 1010 M didusun Sungai Dungun yang didanai oleh dari Dana Desa.
- 2) Pembangunan Kantor Desa yang didanai oleh dari Alokasi Dana Desa (ADD)

Aset Desa Sungai Dungun memiliki beberapa macam aset desa diantaranya:<sup>41</sup>

- a) Tanah kuburan 3 ha di empat lokasi
- b) Tanah kebun TKD 4 ha tidak produktif
- c) Tanah lahan kantor 20 x 50 m
- d) Kantor Desa, dsb

## 8. Pelayanan Masyarakat

---

<sup>41</sup> Dokumentasi Desa Sungai Dungun, di Desa Sungai Dungun, Profil Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

Kantor Desa Sungai Dungun selalu dibuka setiap jam kerja. Namun selain Kepala Desa dan Sekdes Pegawai Desa yang lainnya memiliki jadwal kerja tersendiri. Ada yang masuk satu minggu dua hari saja seperti KAUR Pemerintahan, KAUR Umum, KAUR Pembangunan dan KAUR Keuangan dan ada yang masuk satu bulan tiga kali saja seperti BPD dan KADUS. Pelayanan masyarakat selalu diberikan kapan saja tanpa melihat jam atau waktu dan tempat. Kepala Desa dan Sekdes selalu memberikan informasi kepada masyarakat.<sup>42</sup>

## 9. PKK

Peranan serta PKK dalam menjalankan roda pemerintahan cukup besar dalam setiap rapat atau musyawarah desa selalu melibatkan ibu-ibu PKK dan saran dari ibu-ibu pun selalu jadi bahan pertimbangan. Pada tahun 2013, ibu-ibu PKK telah memprogramkan kursus menjahit yang didanai oleh program SAMISAKE yaitu sebanyak 12 orang. Pelaksanaan Posyandu selalu melibatkan ibu-ibu PKK dan pada tahun 2012 telah dikirim salah seorang ibu PKK ke Provinsi Lampung guna ikut pelatihan kerajinan tangan melalui program PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

## 10. Keadaan Ekonomi Penduduk<sup>43</sup>

### a. Mata Pencaharian

Ekonomi Desa Sungai Dungun sangat tergantung kepada hasil perkebunan karet, sawit dan padi sawah tadah hujan. Dengan mata pencaharian penduduk 70% sebagai petani karet, 10% sebagai petani sawit, 10% sebagai pedagang dan

<sup>42</sup> Dokumentasi Desa Sungai Dungun, di Desa Sungai Dungun, Profil Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

<sup>43</sup> Dokumentasi Desa Sungai Dungun, di Desa Sungai Dungun, Profil Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

10% lainnya bekerja sebagai PNS dan pekerja serabutan. Begitu pula keadaan pasar desa yang dibuka hanya satu minggu sekali sangat ditentukan oleh harga karet dan harga sawit. Jika harga karet dan sawit menurun maka keadaan pasar akan sepi dan jual beli juga berkurang. Karena Desa Sungai Dungun merupakan desa pertanian dan perkebunan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani

Tabel 06  
Mata Pencarian<sup>44</sup>

Usia Produktif	350 Jiwa
Usia Non Produktif	120 Jiwa

#### b. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah di Desa Sungai Dungun sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sedangkan kebutuhan pupuk masyarakat: (dalam ton/tahun).

Tabel 07  
Pola Penggunaan Tanah<sup>45</sup>

Lahan Basah	Lahan Kering
1.700 ha	72 ha

#### c. Pemilik Ternak

<sup>44</sup> Dokumentasi Desa Sungai Dungun, di Desa Sungai Dungun, Profil Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

<sup>45</sup> Dokumentasi Desa Sungai Dungun, di Desa Sungai Dungun, Profil Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.



Jumlah kepemilikan hewan ternak pendudukan Desa Sungai Dungun berjumlah 650 ekor terdiri dari sapi, kambing dan unggas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian

##### 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

###### a. Mengajak Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi, mengawasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi adalah salah satu prinsip dai *good governance*, agar UU Nomor 6 tahun 2014 dapat diterapkan dan berjalan, maka di Desa Sungai Dungun ini, partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam penilaian kinerja dari perangkat Desa Sungai Dungun tersebut. Hal ini diperuntukkan untuk untuk merangkul masyarakat dalam memenuhi kepentingan masyarakat setempat seperti infrastruktur jalan, pendidikan dan mushola. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Badaruddin selaku kepala Desa Sungai Dungun , sebagai berikut:

Dalam penyelenggaraan pemerintah berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 kami berupaya mengajak partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan desa, seperti; jalan yang menjadi pusat mata pencarian masyarakat. Karena jalan yang bagus dapat mempermudah kendaraan pengangkut kelapa keluar masuk untuk antar jemput atau jual beli buah kelapa.<sup>46</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, bentuk partisipasi masyarakat di Desa Sungai Dungun terus diupayakan oleh pemerintah desa,

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Badaruddin selaku kepala Desa Sungai Dungun di Kantor Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

dengan merangkul masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan. Karena jalan merupakan akses penting di daerah tersebut, sehingga pemerintah desa mengajak partisipasi masyarakat. Yang mana jalan merupakan hal penting dalam proses transportasi antar jemput hasil panen para petani kelapa . M. Tohir, selaku Kaur pembangunan pemerintahan menambahkan, dengan adanya partisipasi masyarakat sangat membantu pembangunan desa. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut:

Kami terus berupaya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, agar pemerintahan berjalan dengan baik. Terlepas dari peran serta masyarakat kami juga merangkul LSM dan Mahasiswa untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik, karena dengan adanya mereka dapat memberikan masukan yang positif untuk kemajuan pemerintahan ini.<sup>47</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, bentuk partisipasi masyarakat dalam kinerja perangkat Desa Sungai Dungun adalah ikut mengawasi kegiatan dan kinerja yang dilakukan pegawai, biasanya dalam proses pembanguan jalan, gedung, pemukiman, mushola, sarana pendidikan, pengairan, dan bentuk pembangunan lainnya yang dilaksanakan di daerah sekitar Desa Sungai Dungun ini. Selain itu masyarakat pun bisa melakukan pengaduan langsung kepala Desa Sungai Dungun, apabila ada pembangunan yang dilakukan oleh perangkat Desa Sungai Dungun yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat atau pembangunan yang dulu telah rusak bisa masyarakat adukan ke Kantor Desa Sungai Dungun untuk bisa diperbaiki, karena tanpa adanya bantuan dan partisipasi langsung dari masyarakat, pembangunan tidak akan berjalan dengan

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan M. Tohir, selaku Kaur pembangunan di Kantor Desa Sungai Dungun, 5 September 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

baik dan tidak akan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Amer Udawi, selaku Kaur Umum di Kantor Desa Sungai Dungun , sebagai berikut:

Biasanya bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan di Desa Sungai Dungun berupa pengaduan tentang infrastruktur jalan, jembatan dan pasar timbang yang rusak dan harus diperbaiki dan juga beberapa di antara mereka ikut andil dalam membangun infrastruktur tersebut saat sedang dibangun atau diperbaiki kembali. Selain masyarakat ada juga yang ikut berpartisipasi adalah LSM, mahasiswa dan masyarakat umum lainnya. Selain itu kami di sini sudah tentu melibatkan stakeholder dalam semua aktivitas perencanaan pembangunan.<sup>48</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, keterlibatan masyarakat terhadap proses pembangunan yang dilakukan perangkat Desa Sungai Dungun dalam hal ini hanya sebatas pengaduan dan sebagian yang terlibat dalam pembangunan, dengan kata lain masyarakat terlibat ketika proses pembangunan tersebut sudah berjalan bahkan sudah rampung, namun pada tahap proses pengawasan berjalannya pembangunan, masyarakat tidak banyak yang turut ikut berpartisipasi sehingga bentuk pengaduan yang dilakukan masyarakat bisa dikategorikan terlambat. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Jali selaku Masyarakat di Desa Sungai Dungun ,, sebagai berikut:

Hanya sebagian saja itu yang ikut serta bekerja, sedangkan banyak masyarakat di sini membutuhkan pekerjaan, kenapa tidak masyarakat di sini semua saja, malah nyewa tukang dari luar. Kadang juga jalan yang diperbaiki cuma jalan yang menuju kantor-kantor desa saja tidak semuanya diperbaiki.<sup>49</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, sebagian besar bentuk pembangunan yang dilakukan oleh perangkat desa tidak sesuai harapan

<sup>48</sup>Wawancara dengan Amer Udawi, selaku Kaur Umum di Kantor Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

<sup>49</sup>Wawancara dengan Bapak Jali selaku Masyarakat di Desa Sungai Dungun, 05 September 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



masyarakat dikarenakan yang terlibat dari mulai proses perencanaan hingga rampungnya suatu pembangunan, masyarakat tidak diikutsertakan. Seharusnya tahap partisipasi di sini melibatkan masyarakat pada proses pembangunan sudah dilakukan dari tahap perencanaan hingga selesainya proses pembangunan.

## 2. Kewenangan Pembangunan Desa (KEBIJAKAN)

Pertanggungjawaban merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa berdasarkan kewenangan yang telah dimiliki oleh perangkat desa berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan alokasi anggaran pembangunan desa selalu berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik dalam kegiatan atau kinerja yang dilakukan untuk masyarakat tentunya dan keinginan mewujudkan pemerintahan yang baik. Perangkat desa akan mempertanggungjawabkan setiap pembangunan atau hasil kerja yang dinilai kurang baik atau tidak sesuai seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Badaruddin selaku kepala Desa Sungai Dungun, sebagai berikut:

Pertanggungjawaban yang telah kami lakukan tentu memberikan dampak positif dan juga negatif dari masyarakat, untuk tentu kami siap bila adanya kesalahan dana dalam melakukan pembangunan seperti perbaikan jalan, perbaikan jembatan dan pembuatan pasar timbang di sini. Bila ada ketimpangan dalam pekerjaan pada pembangunan dan pemberdayaan desa yang diperuntukkan untuk masyarakat di sini menjadi sebuah permasalahan dan masyarakat mencoba menuntut pada pekerjaan kami. Kami di sini ini

sangat sulit masalah anggaran, terkadang anggaran yang turun itu sangat minim sekali. Sedangkan kebutuhan desa sangat banyak.<sup>50</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, kepala Desa Sungai Dungun meyakini bahwa siap apabila ada ketidakselarasan dana dengan pembangunan yang dibangun dan dalam pembangunan desa demi kepentingan masyarakat, semuanya itu tergantung dari anggaran atau dana yang diberikan oleh pemerintah untuk proses pembangunan yang dilakukan, sedangkan anggaran yang ada sangat minim dan terkadang kekurangan dalam proses pembangunan, sehingga proses pembangunan pun jadi terhambat, sebagaimana dapat dilihat dari wawancara bersama Bapak M. Tohir selaku Kaur pembangunan sebagai berikut:

Kewenangan yang dimiliki kepala desa tentu dalam mengatur program kerja yang akan direalisasikan, karena harus dilakukan dengan proses yang benar. Tidak sedikit tentunya dari LSM maupun lapisan masyarakat yang menanyakan bagaimana kinerja kami dan bagaimana kami harus mempertanggung jawabkannya, dan bagaimana cara pemerintah pusat memberikan anggaran pembangunan suatu wilayah. Kami berupaya menggunakan sistem musyawarah dan kami juga memberikan info kepada masyarakat melalui dinding pengumuman atau pun juga melalui facebook desa kami.<sup>51</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, masih terdapat beberapa LSM atau masyarakat Desa Sungai Dungun menanyakan kinerja pemerintah desa, dikarenakan belum adanya perkembangan yang signifikan. Ini didasari dengan adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki Desa Sungai Dungun menyebabkan tertundanya pembangunan yang ada, dan perangkat pemerintah Desa Sungai Dungun lebih mendahulukan mana yang menjadi prioritas penting masyarakat. Bapak Amer Udawi selaku Kaur Umum Desa Sungai Dungun juga

<sup>50</sup>Wawancara dengan Badaruddin selaku kepala Desa Sungai Dungun di Kantor Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

<sup>51</sup>Wawancara dengan M. Tohir, selaku Kaur pembangunan di Kantor Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menambahkan bahwa, dalam mencapai akuntabilitas maka perlu adanya keselarasan pemikiran dalam pembangunan suatu daerah. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis sebagai berikut:

Kami harus memberikan pemahaman terhadap masyarakat, terkait kewenangan kami di sini. Sekarang ini sudah ada UU tentang desa, dan semuanya sudah ada prosedurnya di sana. Namun yang menjadi kendala adalah masyarakat masih saja tetap berpikiran yang tidak-tidak dengan pemerintah di sini. Kami hanya bisa menjalankan peraturan yang ada dan kami juga terus berupaya bekerja sama dengan satu sama lain untuk membangun pemerintahan ini agar lebih baik. Untuk itu segala sesuatunya harus bisa dipertanggungjawabkan baik pembangunan dan juga pemberdayaan, pemabangunan kita memperbaiki jalan yang telah rusak, kita juga membangun jembatan agar aliran sungai dapat mengalir dengan baik, sehingga jalanpun akan tetap baik karena aliran air tidak menggenang. Sedangkan dalam pemberdayaan kami memberikan kesempatan bagi warga untuk mengikuti kegiatan wirausaha, dari mulai kerajinan tangan dan juga memulai usaha menengah ke atas menggunakan kelapa, baik itu dari sabut kelapa, ataupun batok kelapa, ini kami lakukan dengan cara melakukan simpan pinjam di Koperasi Unit Desa.<sup>52</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, kewenangan perangkat desa difokuskan dalam pembangunan dan juga pemberdayaan, dalam hal pembangunan desa dan pemberdayaan desa anggaran terus diupayakan dengan sebaik-baiknya, karena dengan begitu masyarakat akan mengetahui dengan adanya perundang-undangan yang baru ini dapat membantu dalam membangun desa agar lebih baik lagi. Karena ini merupakan perundangan yang baru masih terdapat beberapa kekurangan dari aspek pelaksanaan dan SDM yang ada.

Disisi lain juga pemerintah Desa Sungai Dungun terus mengupayakan adanya dokumen laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan desa tahunan ke

<sup>52</sup>Wawancara dengan Amer Udawi, selaku Kaur Umum di Kantor Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bupati/walikota dan juga pada masyarakat, menghasilkan dokumen perencanaan desa jangka menengah dan tahunan di desa; adanya dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah desa; adanya dokumen laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis di setiap akhir tahun anggaran ke BPD, menghasilkan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keterangan laporan pertanggungjawaban di desa; ada penerapan sanksi sesuai undang-undang jika gagal melaksanakan poin-poin tersebut. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Ibu Siti Nurjanah selaku Sungai Dungun, sebagai berikut:

Setahu saya dalam pembangunan selalu di infokan di group facebook, jadi semuanya bisa diketahui. Berhubung suami saya BPD di sini, sedikit banyak saya tahu tentang pembangunan desa dan anggaran desa di sini. Jadi kendala memang di anggaran dana dalam pembangunan, itu permasalahan dari dulu itu. Anggaran bukan untuk pembangunan sedangkan warga mau dibangun ini dan itu, jadi masih mengalami kendala dalam hal pemenuhan keinginan masyarakat di sini.<sup>53</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, pemerintah Desa Sungai Dungun telah memberikan kewenangannya dalam menerapkan UU Nomor 6 tahun 2014, meskipun belum maksimal, namun dengan cara bertanggungjawab dalam anggaran dan pembangunan desa pemerintah Desa Sungai Dungun masih dapat dipercayai untuk memimpin pemerintah Desa Sungai Dungun menjadi lebih baik. Ini didasari oleh adanya upaya masyarakat sipil, individu dan kelompok, serta media yang menekan pengambilan keputusan untuk meminta informasi dan penjelasan atas semua keputusan di ranah kewenangannya.

<sup>53</sup>Wawancara dengan Nurlina, selaku Masyarakat di Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Pauzi Hasan selaku ketua adat Desa Sungai Dungun , sebagai berikut:

Kalau saya melihatnya pembangunan yang telah dilakukan cukup menjawab keinginan masyarakat, namun tentu masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, karena masyarakat inginnya ini, namun pemerintah desa mau membangun itu. Memang telah didiskusikan bersama-sama dengan BPD, namun kepala desa pintar berbicara jadi kami yang tidak bisa bicara seperti dia akhirnya mengikuti saja, selain itu juga msyarakat disini sedikit saja yang kompak dan mau bergotong royong.<sup>54</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, masih terdapat kekurangan dalam pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat yang ada, karena keinginan masyarakat tidak terjawab oleh pembangunan desa, selain itu pula ada SDM perangkat desa tidak menguasai bidangnya sehingga anggaran yang ada ditakutkan bisa digunakan tidak tepat sasaran. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan agar tidak berpengaruh pada partisipasi masyarakat yang dirasa masih kurang, namun bentuk pertanggung jawaban suatu pembangunan yang dilakukan perangkat Desa Sungai Dungun nampaknya cukup baik baik, seperti halnya dibuktikan dengan adanya pembangunan jembatan, jalan dan pasar timbang untuk penimbangan hasil panen kelapa. Hal ini menunjukkan adanya usaha yang sungguh-sungguh dari pihak perangkat desa untuk melakukan pembangunan daerah ke arah yang lebih baik.

### 3. Pembinaan Masyarakat Desa

Pembinaan masyarakat diperuntukkan dalam tercapainya sebuah organisasi ekonomi rakyat yang dapat dirasakan secara efektif dan efisien dan dapat menolong masyarakat dalam mensejahterakan kehidupannya. Melalui

<sup>54</sup>Wawancara dengan Pauzi Hasan selaku ketua adat Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.



pengorganisasian terjadilah kerja antar orang, antar kelompok, dan antar bagian. Agar lembaga adat dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Sungai Dungun maka lembaga perlu melakukan pertemuan kepada masyarakat Desa Sungai Dungun secara profesional dan melibatkan. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Pauzi Hasan selaku ketua adat Desa Sungai Dungun , sebagai berikut:

Kami berupaya melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Sungai Dungun selama lima bulan sekali dan kami juga berupaya melakukan yang terbaik. Di sini adat masih kita jaga dengan baik jadi kami terus melakukan pertemuan untuk membahas kebijakan yang disepakati bersama dan usaha-usaha yang dijalani terus ditingkatkan, untuk usaha kami memberikan masyarakat Desa Sungai Dungun untuk ikut bergabung dan memberikan partisipasinya.<sup>55</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, dengan melakukan pertemuan masyarakat Desa Sungai Dungun maka dapat membentuk segala keputusan yang sifatnya mendasar mengenai kemudahan yang dirasakan bagi masyarakat Desa Sungai Dungun , setiap orang mempunyai hak yang sama dalam mengeluarkan pendapatnya. Ketua adat Desa Sungai Dungun dan pemerintah, terus berupaya memberikan terobosan yang baik bagi setiap anggota dalam meningkatkan pendapat ekonomi masyarakat agar lembaga adat Desa Sungai Dungun dapat memberikan manfaat bagi anggota dan juga bagi masyarakat Desa Sungai Dungun . Bapak Pauzi Hasan selaku ketua adat Desa Sungai Dungun bahwa dalam mengatur anggota untuk lebih menumbuhkan pengertiannya maka terus diupayakan rapat dan berkumpul membahas permasalahan yang ada, demi

<sup>55</sup>Wawancara dengan Pauzi Hasan selaku ketua adat Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

terciptanya ekonomi yang baik yang dapat memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat, sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara, sebagai berikut:

Masyarakat Desa Sungai Dungun ada yang tidak tahu sama sekali tentang kegiatan ini, masyarakat yang menjadi anggota itu masih banyak yang awam, ada juga yang sudah mengerti tapi mereka tidak mau berbagi dengan teman-temannya, jadi terkadang kami agak kesulitan. Kami terus mengatur rancangan kerja dengan baik, rancangan kerja ini selama tri-wulan telah terstruktur dengan baik, dan anggota juga bisa mengetahuinya.<sup>56</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, lembaga adat terus berupaya memberikan pengertian kepada masyarakat Desa Sungai Dungun untuk ikut menjadi anggota Kelompok Mandiri Sejahtera dan juga memeberikan kesempatan menjadi anggota agar memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat. Ibu Raudatul Aulia selaku pengurus lembaga adat menambahkan bahwa untuk saat ini lembaga adat merupakan tempat pelatihan bagi para masyarakat yang ingin membangun ekonomi yang lebih baik, sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Kedaaan Kelompok Mandiri Sejahtera saat ini masih terus berupaya mengembangkan pengaturan yang baik dan juga mencoba memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Sungai Dungun sehingga mereka dapat memperbaiki ekonomi dengan cara para petani kelapa membawa langsung hasil panen kelapa mereka kepada Kelompok Mandiri Sejahtera yang mana nantinya kami akan langsung menghubungi toke-toke kelapa tersebut, memang semuanya belum berjalan sebagaimana mestinya, tapi paling tidak mereka merasa terbantu dengan adanya Kelompok Mandiri Sejahtera.<sup>57</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, Kelompok Mandiri Sejahtera merupakan ajang di mana untuk para anggota dalam berlatih

<sup>56</sup>Wawancara dengan dengan Pauzi Hasan selaku ketua adat Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

<sup>57</sup>Wawancara dengan Ibu Raudatul Aulia selaku pengurus lembaga adat, 11 Januari 2018.



mengembangkan pengetahuan dengan begitu SDM yang ada di Kelompok Mandiri Sejahtera akan membaik. Kelompok Mandiri Sejahtera adalah sebagai usaha belajar dan kerjasama untuk memecahkan segala persoalan atau permasalahan yang menjadi penghambat anggota dalam memperbaiki perekonomian keluarganya. Menurut Bapak Badaruddin selaku kepala Desa Sungai Dungun telah berusaha memberikan pengetahuan dan pendidikan terkait mengatur Kelompok Mandiri Sejahtera yang baik di dalam sebuah desa, sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Satahu saya adanya upaya pengurus dalam memberikan pengetahuan kepada anggota dalam pemahaman dilakukan dengan rapat dan berbagi pengalaman satu sama lain, selain itu pula pengurus terus berusaha mengajak masyarakat Desa Sungai Dungun untuk menjadi anggota guna mewujudkan perbaikan ekonomi yang dapat membantu perekonomian masyarakat dan juga menstabilkan perlengkapan kebutuhan dalam hidup.<sup>58</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, pendidikan anggota Kelompok Mandiri Sejahtera merupakan hal yang penting dalam pembinaan dan pengembangan Kelompok Mandiri Sejahtera karena keberhasilan atau kegagalan Kelompok Mandiri Sejahtera banyak tergantung pada tingkat pendidikan dan partisipasi anggota. Agar partisipasi memberikan dampak yang positif, maka keterlibatan anggota dalam kegiatan usaha Kelompok Mandiri Sejahtera harus dapat diwujudkan, hal ini juga merupakan peran serta anggota dalam struktur organisasi. Oleh karena itu, pendidikan sangat diperlukan untuk memberikan bekal yang memadai kepada anggota, agar anggota dapat berperan secara aktif dan dinamis.

<sup>58</sup>Wawancara dengan Badaruddin selaku kepala Desa Sungai Dungun di Kantor Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

Terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Indikatornya antara lain adalah pelayanan mudah, cepat, tepat dan murah. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Amri selaku bendahara Sungai Dungun, sebagai berikut:

Dalam kewenangan yang dimiliki kepada desa tentu masih belum sepenuhnya berjalan efektif dan itu saya akui, ini disebabkan pembangunan di desa ini banyak yang harus dibangun, ditambah lagi partisipasi masyarakat yang sangat minim karena mau ini dan itu, namun anggaran yang turun dari pemerintah pusat tetap digunakan dengan sebaik mungkin, berhubung kebutuhan pembangunan tidak sedikit maka kami akan membangun bertahap, sedangkan masyarakat maunya langsung, ya jadi kurang lebih mereka ikut membantu.<sup>59</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, kewenangan pemerintah desa berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 telah dilakukan dengan baik, untuk itu demi kelangsungan bersama maka pemerintah desa melakukan pembangunan bertahap, sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak terlebih dahulu untuk dibangun atau diperbaiki. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara bersama Bapak Amri selaku bendahara Desa Sungai Dungun sebagai berikut:

Dengan terlaksananya pembangunan yang efektif dan efisien tentu mempengaruhi roda pemerintahan yang ada, sehingga apabila semua program pembangunan dan pemberdayaan dikerjakan dengan baik, tentu ini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pembangunan dan pemberdayaan di Desa Sungai Dungun. Namun tentu ada saja kendala yang kita hadapi masih terbatasnya sumberdaya manusia yang mampu melahirkan program-program yang baru dan mengerjakan pekerjaan dengan cepat.<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Wawancara dengan Bapak Amri selaku bendahara Desa Sungai Dungun di Kantor Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

<sup>60</sup>Wawancara dengan Bapak Amri selaku bendahara di Kantor Desa Sungai Dungun, 05 September 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, SDM sangat memberikan pengaruh terhadap kinerja perangkat desa dalam membangun desa lebih baik lagi, karena dalam pembangunan desa saat SDM nya terbatas maka akan berdampak kepada pembangunan yang ada di desa tersebut. Ini yang mendasari untuk mencapai pembangunan yang efektif dan efisien masih belum terlaksana dengan baik karena karakter perangkat desa yang mana setiap perangkat mempunyai karakter-karakter yang berbeda, terkadang ketika diberikan pengarahan-pengarahan, memang bisa mereka dengarkan namun mungkin karena keterbatasan perangkat yang terkadang tidak bisa menerapkannya atau mengimplementasikannya. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Amer Udawi selaku Kaur Umum Sungai Dungun, sebagai berikut:

Masih ada perasaan ego dalam diri masing-masing, yang satu tidak mau dikasih tahu dan yang satu lagi kesal karena tidak didengarkan, jadi saling salah menyalahkan, dengan seperti itu maka akan sangat sulit untuk bermusyawarah dan berdiskusi. Sebetulnya kalau ada kerjasama yang baik dan mau bergotong-royong saya rasa akan cepat membaik pemerintahan di sini, hilangkan sistem keluarga yang selalu benar di sini.<sup>61</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, keterbatasan atau kualitas SDM di mana setiap pegawai yang sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan belum sepenuhnya menerapkan apa yang sudah dipelajari saat pelathan. Kurang maksimalnya kerjasama yang dilakukan membawa akibat kepada kurang efektif dan efisiennya pekerjaan mereka. Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, ketika ada masyarakat melakukan kepengurusan surat pengantar untuk membuat Kartu Tanda Penduduk atau KTP maupun Balik Nama Tanah,

<sup>61</sup>Wawancara dengan Amer Udawi, selaku Kaur Umum di Kantor Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

maka yang lebih dahulu selesai adalah kepengurusan KTP. Ketika bagian kepengurusan KTP selesai dan kepengurusan balik nama belum selesai, bagian kepengurusan KTP kurang responsive untuk membantu temannya dalam kepengurusan Balik Nama Tanah.

Berdasarkan hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian, dengan melakukan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang dilakukan dengan Mengajak Partisipasi Masyarakat, Kewenangan Pembangunan Desa (KEBIJAKAN), dengan bergotong-royong memperbaiki jalan sebagai perputaran ekonomi dan Pembinaan Masyarakat Desa, dengan melakukan musyawarah dalam pengaturan produktivitas petani kelapa.

## **B. Kendala yang Dihadapi Dalam Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian di Desa Sungai Dungun**

### **1. Minimnya Keterlibatan Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat dalam perkembangan dan pembangunan suatu desa, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Bila suatu masyarakat tidak begitu terlibat dalam perkembangan suatu desa maka akan terjadi ketidakselerasian antara perangkat desa dan masyarakat. Minimnya keterlibatan masyarakat di Desa Sungai Dungun yang ikut serta dalam pembangunan dan juga pemberdayaan desa merupakan kendala perangkat Desa Sungai Dungun, setempat seperti infrastruktur jalan, jembatan, dan pasar timbang. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara bersama Bapak M. Tohir selaku Kaur pembangunan sebagai berikut:

Dalam pembangunan yang kita lakukan pada masing-masing dusun, tentu kami bekerja sama dengan kepala dusun masing-masing di sana, selain itu pula dengan ketua RT yang ada. Namun dalam pembangunan masih ada beberapa kepala keluarga yang tidak mau ikut membantu. Sebenarnya kita berupaya mengajak keterlibatan masyarakat dalam hal pembangunan dan pemberdayaan desa. Demi harapan agar ada kerjasama antara masyarakat dan pegawai pemerintahan dalam membangun desa ini lebih baik lagi, namun mereka terkadang memiliki kegiatan masing-masing untuk mencari nafkah keluarganya.<sup>62</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, bentuk keterlibatan masyarakat di Desa Sungai Dungun masih tergolong rendah, namun dilain hal perangkat desa terus berupaya merangkul masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan. Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa pembangunan desa terutama jalan dan juga parit jalan merupakan akses penting di daerah tersebut, sehingga pemerintah desa mengajak keterlibatan masyarakat dalam pembangunannya dan juga perawatannya. Meskipun masih ditemui hanya beberpa masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan desa, karena masih terdapat unsur kekeluargaan. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Amri selaku bendahara Desa Sungai Dungun , sebagai berikut:

Sejauh ini yang telah kita alami dari tahun 2016-sampai tahun 2017 dan sekarang masih saja ada beberapa masyarakat yang tidak mau ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa. Kalaulah ada dukungan dari semua masyarakat di desa ini, tentu semuanya akan cepat dalam hal pembangunan. Makanya kami terus berupaya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, agar pemerintahan berjalan dengan baik. Terlepas dari peran serta masyarakat kami juga merangkul mahasiswa untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik, karena dengan adanya mereka dapat memberikan masukan yang positif untuk kemajuan pemerintahan ini.<sup>63</sup>

<sup>62</sup>Wawancara dengan M. Tohir, selaku Kaur pembangunan di Kantor Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

<sup>63</sup>Wawancara dengan Bapak Amri selaku bendahara Desa Sungai Dungun di Kantor Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, perlu adanya dukungan dari masyarakat dalam mencapai pembangunan yang baik, perangkat desa juga bekerja sama dengan mahasiswa untuk memberikan masukan. Maka diperlukan dukungan yang tinggi dari masyarakat serta keterlibatan dalam pembangunan desa. Penulis menemukan bahwa dalam proses pembangunan jalan, gedung, pemukiman, mushola, sarana pendidikan, pengairan, dan bentuk pembangunan lainnya yang dilaksanakan di daerah sekitar Desa Sungai Dungun masih mengandalkan beberapa orang saja, minimnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, terutama perbaikan jalan, jembatan, dan pasar timbang, sedangkan ini merupakan hal yang penting dalam kelancaran air ketika hujan turun. Karena tanpa adanya bantuan dan partisipasi langsung dari masyarakat, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Amer Udawi selaku Kaur Umum Desa Sungai Dungun , sebagai berikut:

Sejauh ini keterlibatan masyarakat yang ada itu kalau mereka ingin melaporkan tentang pembangunan dan juga pemberitahuan tentang pembangunan yang akan dibangun. Untuk itu partisipasi masyarakat yang ada mereka lakukan hanya pelaporan dan keluhan saja, kalau disuruh untuk membangun dan bergotong-royong mereka terkadang tidak ikut.<sup>64</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, keterlibatan masyarakat terhadap proses pembangunan yang dilakukan perangkat Desa Sungai Dungun dalam hal ini hanya sebatas pengaduan dan sebagian yang terlibat dalam pembangunan, dengan kata lain masyarakat terlibat ketika proses pembangunan

<sup>64</sup>Wawancara dengan Amer Udawi, selaku Kaur Umum di Kantor Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

tersebut sudah berjalan bahkan sudah rampung, namun pada tahap proses pengwasan berjalannya pembangunan, masyarakat tidak banyak yang turut ikut terlibat sehingga bentuk pengaduan yang dilakukan masyarakat bisa dikategorikan terlambat.

Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Santoso, Yoga dan Suherman selaku Masyarakat Desa Sungai Dungun, sebagai berikut:

Para muda-mudi juga kurang dalam menjaga fasilitas umum<sup>65</sup> Mereka sering nongkrong yang tidak-tidak sehingga terkadang mereka membawa pulang alat timbang.<sup>66</sup> Bukan hanya itu jalan-jalan juga semakin parah dengan adanya mobil-mobil yang lalu lalang untuk mengangkut kelapa, tentu lah hal ini bisa merusak jalan, kalo sudah begini akibatnya masyarakat lainnya juga kena dampak rusaknya jalan raya<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya kurangnya rasa kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam menjaga fasilitas desa, para muda-mudi melakukan kegiatan mencoret-coret dinding dan gapura. Masalah lainnya juga di akibatkan dari truk-truk pengangkut sawit yang mengakibatkan rusaknya jalan raya yang ada di Desa Sungai Dungun.

## 2. Kemampuan SDM yang Terbatas

Terselenggaranya kegiatan pemerintah desa dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab maka akan mencapai target yang telah dicanangkan, namun bila sebaliknya justru akan menjadi kendala

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak Santoso, selaku Masyarakat Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

<sup>66</sup>Wawancara dengan Bapak Yoga, selaku Masyarakat Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

<sup>67</sup>Wawancara dengan Bapak Suherman, selaku Masyarakat Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

yang berkepanjangan. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Pauzi Hasan selaku ketua adat Desa Sungai Dungun , sebagai berikut:

Kemampuan SDM yang ada di kantor desa itu masih belum berjalan efektif dan juga belum mampu menjawab keinginan masyarakat, ini disebabkan mereka itu masih ada sangkut paut keluarga, jadi yang tidak memiliki kemampuan pun ikut bekerja di sana Ditambah lagi dalam sistem administrasi masih ada yang mengandalkan orang lain.<sup>68</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, kinerja perangkat Desa Sungai Dungun masih belum berjalan dengan baik, ini dikarenakan terbatasnya SDM yang memahami dalam memberikan kewenangannya. Sebagian besar dari mereka adalah pegawai lama yang masih butuh ilmu teknologi, sehingga terjadi limpahan pekerjaan pada segelintir orang saja di kantor Desa Sungai Dungun . Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Amri selaku bendahara Desa Sungai Dungun , sebagai berikut:

Untuk saat ini kita memang mengalami permasalahan dalam hal SDM di sini, sebagian ada yang sudah mau pensiun tapi karena ada unsur kekeluargaan yang masih tetap di sini. Itu yang menjadi kendala di sini, hingga terkadang perencanaan pembangunan itu tidak sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga berdampak kepembangunan yang tidak berjalan dengan baik.<sup>69</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, SDM sangat memberikan pengaruh terhadap kinerja perangkat desa dalam membangun desa lebih baik lagi, karena dalam pembangunan desa saat SDM nya terbatas maka akan berdampak kepada pembangunan yang ada di desa tersebut. Ini yang mendasari belum efektif dan efisien kinerja dalam pembangunan Desa Sungai Dungun . Berdasarkan observasi penulis menemukan bahwa kendala SDM sangat

<sup>68</sup>Wawancara dengan Pauzi Hasan selaku ketua adat Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

<sup>69</sup>Wawancara dengan Bapak Amri selaku bendahara Desa Sungai Dungun di Kantor Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

mempengaruhi perkembangan Desa Sungai Dungun karena karakter perangkat desa yang mana setiap perangkat mempunyai karakter-karakter yang berbeda, terkadang ketika diberikan pengarahan-pengarahan, memang bisa mereka dengarkan namun mungkin karena keterbatasan perangkat yang terkadang tidak bisa menerapkannya atau mengimplementasikannya. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Ibu Meta, Sifah dan Mia selaku masyarakat Desa Sungai Dungun , sebagai berikut:

Memang para stafnya kurang memahami masalah komputer, mereka sangat kesusahan dalam mengoperasikan komputer jadi pekerjaan yang mereka lakukan menggunakan computer mejadi lambat.<sup>70</sup> Iya terkadang mereka meminta bantuan staf lainnya dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi jadi staf yang mereka tolong bantuan menjadi kewalahan dan lalai juga dalam mengatasi pekerjaan mereka.<sup>71</sup> Keterlambatan dan kedisiplinan juga merupakan masalah yang sering muncul, tentu saja hal itu sangat menghambat kinerja dari staf-staf tersebut jika waktunya molor tentu saja akan memperlambat kerjaan.<sup>72</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, Staf-staf yang di Desa Sungai Dungun ada kurang memahami masalah komputer, sehingga menghambat pekerjaan staf lainnya. Masalah lainnya juga muncul yaitu tentang kedisiplinan para staf yang ada di desa hal ini tentu saja sangat mempengaruhi kinerja dari para staf itu sendiri.

Dari pnejelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Desa Sungai Dungun, diantaranya; Minimnya Keterlibatan Masyarakat, di mana masih ada masyarakat

<sup>70</sup>Wawancara dengan Ibu Meta, selaku Masyarakat di Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

<sup>71</sup>Wawancara dengan Ibu Sifah selaku Masyarakat di Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

<sup>72</sup>Wawancara dengan Ibu Mia, selaku Masyarakat di Desa Sungai Dungun, 5 September 2019.

yang tidak terlibat dalam pembangunan desa dan Kemampuan SDM yang Terbatas, di mana tidak semua pegawai pemerintah desa mampu mengatur dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Desa Sungai Dungun.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian, untuk itu secara khusus dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian, dengan melakukan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang dilakukan dengan Mengajak Partisipasi Masyarakat, Kewenangan Pembangunan Desa (KEBIJAKAN), dengang bergotong-royong memperbaiki jalan sebagai perputaran ekonomi dan Pembinaan Masyarakat Desa, dengan melakukan musyawarah dalam pengaturan produktivitas petani kelapa.
2. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Desa Sungai Dungun, diantaranya; Minimnya Keterlibatan Masyarakat, di mana masih ada masyarakat yang tidak terlibat dalam pembangunan desa dan Kemampuan SDM yang Terbatas, di mana tidak semua pegawai pemerintah desa mampu mengatur dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Desa Sungai Dungun.

#### B. Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya para perangkat Desa Sungai Dungun diberikan pemahaman pentingnya menambah ilmu pengetahuan.
2. Hendaknya semua perangkat Desa Sungai Dungun terus diberikan pelatihan agar kinerja perangkat desa semakin membaik.
3. Hendaknya perangkat Desa Sungai Dungun bekerjasama dengan masyarakat dalam hal pembangunan dan memberikan sistem transparansi yang berkesinambungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. LITERATURE

- Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Pustaka Indonesia Press, 2011
- Budimana Rusli, *Kebijakan Publik Membangaun Pelayanan Publik Yang Responsip*, Jawa Barat: Hakim publishing, 2013.
- Djuni Pristianto, *Panduan Penyusunan RPJM Desa*, Jakarta: Yayasan Penabulu, 2015.
- Entang Sastraadmaja, *Pembangunan Koperasi Teori Dan Kenyataan*, Bandung: Penerbit Alumni, 1985.
- Ilyas, Abdurrahman, dan Sufyan, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah”, *Jurnal Ilmu Hukum Ilyas, Abdurrahman, Sufyan* No. 65, Th. XVII April, 2015.
- Litan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: PT Bumi Kasara, 2017).
- Mikhael Wurangian, “Kebijakan pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Bagi Masyarakat Petani Desa Basaan I Kecamatan Ratatotok)”, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Martinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009.
- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Fakultas Syari’ah IAIN STS Jambi, 2012.



Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

## B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa

## C. JURNAL DAN INTERNET

Abdul Rajak Abdjul, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Jagung, 2016.

Anom Surya, “Buku Teori Hukum dan Kebijakan Publik; Karya Anom Surya Putra”, [https://www. Academia.Edu/7551616/Buku\\_Teori\\_Hukum\\_dan\\_Kebijakan\\_Publik\\_Karya\\_Anom\\_Surya\\_Putra](https://www.Academia.Edu/7551616/Buku_Teori_Hukum_dan_Kebijakan_Publik_Karya_Anom_Surya_Putra), diakses pada 05 April 2016.

Adinda Permatasari Rahadian, “Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Pada Kementerian Pertanian”, *Jurnal pertanian* volume 3 nomor 5, 2008.

Borni Kurniawan, *desa Mandiri, desa Membangun*, Jakarta: Kementerian desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tra Abdul Rajak Abdjul, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Jagung, 2016.

Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

Eklawati, “Upaya Petani Karet Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Dusun Semidang Desa Suka Maju.

Heru Darmawan, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Desa*.

Silahudin, *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

## INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya memperoleh informasi dan data yang obyektif. Peneliti melakukan wawancara kepada pemerintah Desa Sungai Dungun.

Adapun Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Sungai Dungun?
2. Bagaimana perkembangan yang dicapai Desa Sungai Dungun?
3. Apa Visi dan Misi Desa Sungai Dungun?
4. Bagaimana keadaan struktur organisasi Desa Sungai Dungun?
5. Bagaimana keadaan prangkat desa/pekerja Desa Sungai Dungun?
  - a. Latar belakang pendidikan
  - b. Alamat
  - c. Usaha yang dilakukan untuk peningkatan profesionalisme
6. Bagaimana keadaan penduduk Desa Sungai Dungun?
  - a. Jumlah
  - b. Keadaan
7. Bagaimana kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian?
8. Apa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Desa Sungai Dungun?
9. Bagaimana upaya masyarakat dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Desa Sungai Dungun?
10. Bagaimana harapan pemerintah Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

### Lampiran III

## DOKUMENTASI



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### Lampiran III

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### Lampiran III

## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



## Lampiran II

### DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan
1	Bapak Ahmadi	Kabid Sarana dan Prasaena Dinas Holtikultura Kabupaten Muaro Jambi
2	Bapak Ir. Madong Butar	Sekretaris Bidang Holtikultura Kabupaten Muaro Jambi
3	Bapak Ali	Kepala Bidang Human Dinas Dinas Pertanian dan Holtikultura Muaro Jamb
4	Ibu Nurwakidah	petani di Desa Rengas Bandung
5	Ibu Aminun	petani di Desa Rengas Bandung
6	Bapak Edi	Kepala Bidang Penyedia Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian dan Holtikultura Muaro Jambi
7	Bapak Nurdin	petani di Desa Rengas Bandung
8	Bapak Narianto	petani di Desa Rengas Bandung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

## CURRICULUM VITAE



### A. Identitas diri

Nama : M. Aji  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Dualap, 15 Mei 1996  
Alamat Asli : Sunagi dungun, RT 05, Kec, kuala betara,  
Kab,Tanjung Jabung Barat  
Alalamt Sekarang : JL.zuhdi Simpang Sungai Duren  
kec,jambi luar kota,, kabupaten muaro jambi  
No Telepon : 0823-0772-9619  
Nama Ayah : M. Ikkik  
Nama Ibu : Kartini

### B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, Tahun lulus : SD sungai Dualap  
SMP/MTS, Tahun Lulus : MTS Al-baqiatush Shalihat  
SMA/MA, Tahun Lulus : SMK SPP N 3

### C. Pengalaman Organisasi

Anggota Harian HMI (Himpunan Maha siswa Islam)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi